Gubernur dan Bupati se-Jatim Tanda Tangan Komitmen Anti Korupsi Bersama KPK



Kamis, 8 Maret 2018

Gubernur dan Bupati se-Jawa Timur menandatangani komitmen bersama untuk memberantas korupsi bersama KPK di Gedung Grahadi, Surabaya. Acara ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Jawa Timur, mengingat sejumlah ASN di Jawa Timur terjerat dalam OTT KPK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa berbagai tahapan pemerintahan rentan korupsi, seperti penyusunan APBD, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berkomitmen untuk mengubah kebiasaan korupsi menjadi anti korupsi dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sekretaris Irjen Kemendagri, Sutejo, menyampaikan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi pintu awal kegagalan manajemen pemerintahan dan korupsi di daerah. Pimpinan KPK, Laode M Syarif, menilai Jawa Timur lebih siap dalam mencegah intervensi pengadaan barang dan jasa dibandingkan provinsi lainnya. KPK mendukung langkah Pemprov Jatim dalam memperkuat pengawasan manajemen, kewenangan APIP, dan optimalisasi e-planning dan e-budgeting.

Pimpinan KPK juga menekankan pentingnya setiap penyelenggara negara untuk menjadi KPK di dalam dirinya sendiri dengan menyaring tindak korupsi, melaporkan LHKPN, dan melaporkan adanya gratifikasi. Penandatanganan komitmen bersama dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, Ketua DPRD se-Jawa Timur, Kapolda, dan Kejati Jatim. Komitmen bersama ini menunjukkan tekad untuk memberantas korupsi di Jawa Timur.

Forpimda Kabupaten Pasuruan diwakili oleh Ketua DPRD, Sudiono Fauzan, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Sutiaji, dalam penandatanganan komitmen tersebut. Penandatanganan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Timur.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.